

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2014). *Politik Lokal & Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Ardhini. (2011). “Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah)”. Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Assyurriani, Raja. (2015). “Pengaruh Rasio Tingkat Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Kepulauan Riau Tahun 2010-2013”. *Jurnal Akuntansi*, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2015). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi (Financial Statistics of Province of Indonesia) 2012-2015*. Jakarta: BPS RI
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2018). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi (Financial Statistics of Province of Indonesia) 2015-2018*. Jakarta: BPS RI.
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Basuki, Tri Agus dan Yuliadi Imamudin. (2015). *Electronic Data Processing (SPSS 15 dan Eviews 7) Edisi Revisi*. Yogyakarta: Danisa Media
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. (2007). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*.
- Dewi, Siska Puspita dan Suyanto. (2015). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Tengah”. *Jurnal Akuntansi*, Volume .3, No.1, hal.9-21. ISSN 2540-9646.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. (2017). *Kajian Fiskal Regional Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI. (2014a). *Deskripsi dan Analisis APBD 2014*.

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI. (2014b). *Laporan Pelaksanaan Spending Performance Dalam Mendanai Pelayanan Publik*.
- Erlina, et.al. (2015) .*Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri No.64 Tahun 2013*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahmi, Irham. (2017). *ETIKA BISNIS (Teori, Kasus, dan Solusi)*. Bandung: ALFABETA
- Ghazali, Imam. (2018). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10*. Semarang: UNDIP
- Halim A. dan Kusufi, Muh.Syam. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik : Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hartono, Jogyanto. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman Edisi 6*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Hasan dan Nurhidayat. (2016). *Laporan Analisis Anggaran Daerah 2016 Hasil Penelitian di 70 Kabupaten/Kota*. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) dan The Ford Foundation (FF).
- Ikhsan dan Suprasto. (2008). *Teori Akuntansi & Riset Multiparadigma*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kilinga, Newton Elvis, and Omwenga, Jane. (2015). “Determinants of Capital Expenditures By County Governments In Kenya: FY 2013/14”. *Journal of Management*. ISSN: 2312-9492, Vol.2 (107), pp 1621-1642.
- Lubis, et.al. (2018). “Determinants of Capital Expenditure with Economic Growth As Moderating Variables in the Government Distric/City on the Island of Sumatra”. *International Conference of Organizational Innovation* Vol. 2018.
- Mahmudi. (2016a). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press.
- _____. (2016b). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.

- Mahsun, Mohamad. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mayasari, dkk. (2014). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng”. *Jurnal Akuntansi*. Volume 2. No.1.
- Miller, M. and Mustapha, S. (2016). “Public Investment Management”. London: Overseas Development Institute.
- Nachrowi, Djalal dan Hardius Usman. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: UI
- Nurlis. (2016). “The Factors Affecting of The Capital Expenditure Allocation Case: The Local Government of Indonesia”. *Research journal of finance and accounting* ISSN 2222-1697 (paper) ISSN 2222-2847 (online) vol.7 no.1.
- Nurulita, *et.al.* (2018). “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Riau”. *Jurnal Benefita* 3(3) hal 336-356
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/Pmk. 02/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/Pmk.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
- Prastiwi, *et.al.* (2016). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta”. *Seminar Nasional IENACO*, ISSN: 2337-4349.
- Praza, Eko Indra. (2016). “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi”. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, ISSN: 2338-4603 (*print*); 2355-8520 (*online*).
- Sekaran, Uma. (2007). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sudaryo, *et.al.* (2017). *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung :Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2015). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan- Teori dan Aplikasi Dengan SPSS*. Yogyakarta : Andi.
- Susetyo, Didik, *et.al.* (2018). “Impact Of Capital Expenditure And Public Utility Customers To Economic Development Of District-City In Sumatra-Indonesia”, *International Journal of Economics And Financial Issues* volume.8 (1) hal. 126-135 ISSN: 2146-4138.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Utami, Dinarossi dan Darma Yanti. (2016). “Pengaruh Efisiensi dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Di Wilayah Sumatera Selatan” *Jurnal Adminika*, Volume 2 No.2 hal 61-77. ISSN.2442-3343
- Website Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (www.bps.go.id) dan website Sistem Informasi Rujukan Statistik BPS, (www.sirusa.bps.go.id).
- Website Bank Indonesia, (www.bi.go.id).
- Website Direktorat Jenderal Anggaran RI, (www.anggaran.depkeu.go.id)
- Website Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (2013). www.keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/35-pembangunan-infrastruktur-dan-sinergi-pusat-daerah

Website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI
(www.djpk.kemenkeu.go.id).

Widarjono, Agus. (2017) *.Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews Edisi Keempat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

www.beritagar.id/artikel/berita/pemerintah-diminta-kembangkan-infrastruktur-maluku-utara

www.databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/09/01/ekonomi-nusa-tenggara-barat-menjadi-yang-terbaik-di-indonesia

www.finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1997203/ini-2-alasan-pemerintah-naikkan-anggaran-belanja-pegawai

www.medcom.id/ekonomi/mikro/ZkeQvQOk-pemda-terlalu-bergantung-pada-anggaran-pemerintah-pusat

